

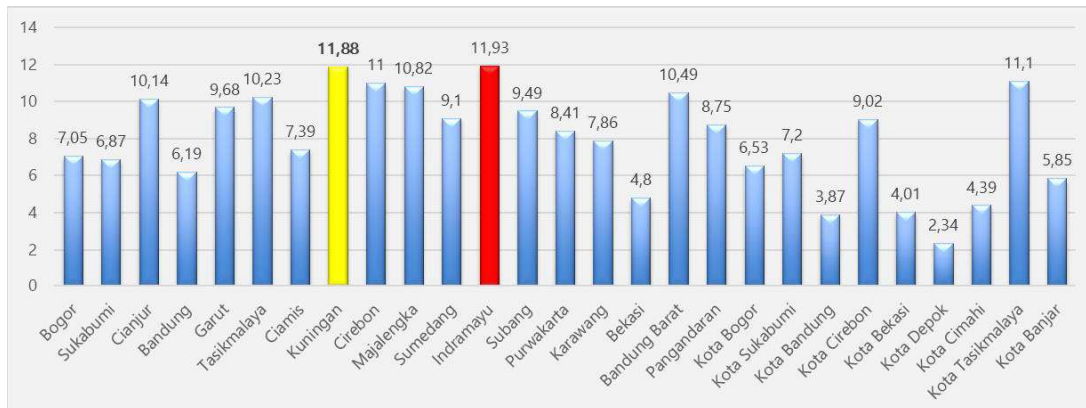
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk dengan nilai guna yang lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi regional, industri menjadi salah satu elemen utama yang sangat berpengaruh. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, sektor industri diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan membangun struktur industri yang tangguh, mandiri, kompetitif, berkembang, dan ramah lingkungan. Selain itu, industri nasional juga perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, tanpa adanya dominasi oleh kelompok tertentu. Pertumbuhan sektor industri diyakini dapat mendorong terbukanya peluang usaha, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres NO.87/2021 mengenai percepatan pembangunan Kawasan REBANA (yang mencakup Cirebon, Patimban, Kertajati) serta wilayah Jawa Barat bagian selatan. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun provinsi, khususnya melalui pengembangan sektor industri. Kawasan REBANA meliputi beberapa daerah, yaitu Subang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Kuningan, dan Kota Cirebon. Dalam pengembangannya, sektor industri akan difokuskan di 13 lokasi yang tersebar di Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, dan Cirebon. Sementara itu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon dirancang sebagai wilayah penyangga atau pendukung kawasan industri tersebut (Widagdo dkk., 2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan No. 26/2011 tentang RTRW Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031, Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan didukung oleh sektor pertanian, perkebunan serta pariwisata. Namun, berjalannya waktu sektor tersebut belum mampu mendongkrak tingkat perekonomian Kabupaten Kuningan. Berdasarkan grafik data diatas yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2024, Kabupaten Kuningan menjadi peringkat 2 sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat setelah Indramayu dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,88%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan berada pada angka 7,78%, angka ini menandakan bahwa pengangguran di Kabupaten Kuningan masing-masing tergolong tinggi (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri di wilayah Kuningan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Permen Perindustrian No. 30/2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri dapat menjadi acuan dalam pengembangan KPI. Menurut peraturan ini, KPI harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti lokasi KPI harus layak untuk kegiatan industri, harus memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan hidup, dan tidak boleh digunakan untuk menekan biaya tenaga kerja. ubah fungsi lahan produktif. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk menentukan lokasi lahan prioritas KPI di Kuningan berdasarkan Permen Perindustrian No. 30/2020 dan kriteria tambahan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa instansi setempat (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020).

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Kuningan menjadi peringkat 2 kabupaten termiskin di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin 11,88% dan persentase pengangguran 7,78%. Hal ini menjadi salah satu indikator buruknya perekonomian di Kabupaten Kuningan. Pada RTRW Kabupaten Kuningan 2011-2031 Kuningan diarahkan untuk menjadi kabupaten konservasi dengan didukung oleh sektor pertanian, perkebunan serta pariwisata, namun strategi tersebut belum mampu permasalahan perekonomian daerah. Pada saat ini Kuningan sedang melakukan proses revisi RTRW Kabupaten Kuningan, dan industri menjadi salah satu sektor yang akan dikembangkan dan diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Kuningan akan dikembangkan

melalui Kawasan Peruntukan Industri, maka perlu dilakukan analisis untuk menentukan lokasi KPI di Kabupaten Kuningan. Rumusan permasalahan dalam penelitian adalah dimana lokasi prioritas pembangunan KPI di Kabupaten Kuningan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menentukan lokasi prioritas bagi pembangunan KPI di Kabupaten Kuningan sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kuningan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan pada penulisan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kriteria lahan untuk pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kuningan berdasarkan Permen Perindustrian No.30/2020;
2. Melakukan analisis lokasi lahan alternatif untuk pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kuningan; dan
3. Memilih lokasi prioritas untuk pembangunan KPI di Kabupaten Kuningan.

1.4 Ruang Lingkup

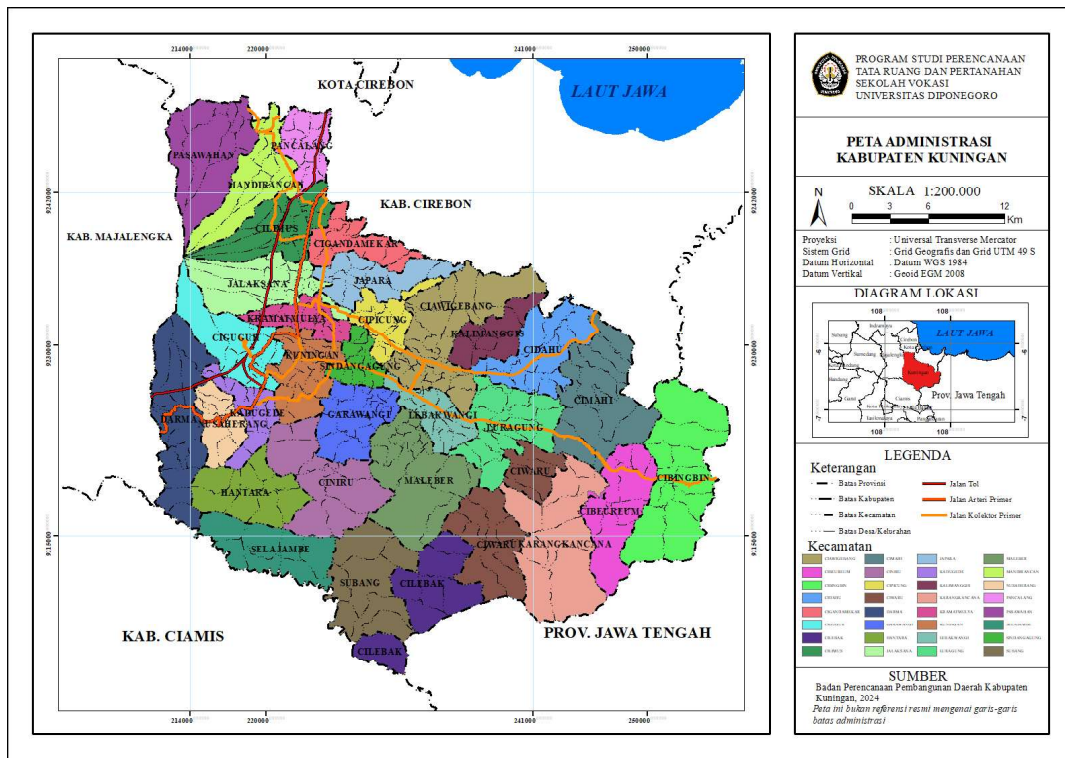
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kuningan yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan wilayah provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah 1.194,09 km², Kabupaten Kuningan terbagi menjadi 32 wilayah kecamatan dan 376 desa/kelurahan. Kabupaten Kuningan memiliki penduduk sejumlah 1.213.927 jiwa pada tahun 2024 dengan kepadatan penduduk 1.006 jiwa/km². Adapun batas-batas wilayahnya diantaranya adalah:

Sebelah barat	: Kabupaten Majalengka;
Sebelah timur	: Kabupaten Brebes (wilayah Provinsi Jawa Tengah);
Sebelah selatan	: Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap (wilayah Provinsi Jawa Tengah); dan
Sebelah utara	: Kabupaten Cirebon.

Pada wilayah Kabupaten Kuningan, terdapat gunung yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Gunung Ciremai inilah yang menjadikan Kabupaten

Kuningan memiliki iklim yang mendukung untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dalam hal komoditas seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.



Sumber: Pengolahan Penulis, 2025

Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Kuningan

Selain itu, Kuningan juga dikenal memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, antara lain Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Kawasan Wisata Cisantana, Kawasan Waduk Darma, Pemandian Air Panas Sangkanhurip, Kolam Ikan Dewa Cibulan, dan lain-lain. Sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kuningan (BPS Kabupaten Kuningan, 2024).

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Materi yang dikaji dalam tugas akhir ini mencakup analisis pembangunan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kuningan sesuai dengan Permen Perindustrian No. 30/2020 dengan batasan sebagai berikut:

1. Melakukan Analisis Daya Dukung Lahan

Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menganalisis tingkat kemampuan lahan untuk mengetahui potensi pengembangan dan tingkat kemampuan pengembangan lahan di Kabupaten Kuningan. Analisis ini dilakukan sesuai dengan pedoman pada Permen PU No.

20/PRT/M/2007 yang terdiri atas analisis satuan kemampuan lahan serta analisis kemampuan lahan.

2. Melakukan Analisis Kriteria Kondisi Lahan

Dilakukan dengan *overlay* data tingkat daya dukung lahan, kawasan rawan bencana, dan kemiringan lereng. Hasil *overlay*, selanjutnya dilakukan skoring dengan ketentuan kriteria lokasi lahan KPI harus memiliki tingkat daya dukung lahan kelas sedang hingga tinggi, tidak berada pada kawasan rawan bencana serta tidak berada pada lahan dengan kemiringan lereng >15%.

3. Melakukan Analisis Kriteria Status & Pola Guna Lahan

Dilakukan dengan *overlay* data penguasaan tanah, kawasan lindung, LP2B & LSD. Hasil *overlay*, selanjutnya dilakukan skoring dengan ketentuan kriteria lokasi lahan KPI tidak boleh berada pada lahan dengan penguasaan tanah adat (ulayat), kawasan lindung, LP2B serta LSD.

4. Melakukan Analisis Jangkauan Jaringan Prasarana Aksesibilitas KPI

Dilakukan analisis skoring jangkauan jaringan prasarana yang mendukung aksesibilitas lokasi KPI sesuai dengan Permen Perindustrian No. 30/2020 yaitu jaringan jalan regional dan rencana pintu tol Cirebon-Kuningan, serta jangkauan sumber air baku, jangkauan pembuangan air limbah, jaringan energi & kelistrikan serta jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kuningan.

5. Melakukan Analisis Penentuan Alternatif Lokasi Lahan KPI

Dilakukan dengan melakukan *overlay* seluruh kriteria KPI sesuai dengan ketentuan Permen Perindustrian No. 30/2020, dimana kriterianya adalah kondisi lahan, status & pola guna lahan, serta hasil analisis jangkauan jaringan prasarana. Hasil analisis ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan luasannya, dimana persyaratan lahan untuk KPI harus memiliki luas lahan minimal 5 Ha. Lahan dengan luas 5-50 Ha dapat dikembangkan untuk sektor industri kecil, menengah dan sentra IKM, sedangkan lahan dengan luas >50 Ha dapat dikembangkan untuk sektor industri besar dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri.

6. Melakukan Analisis Lokasi Prioritas KPI Kabupaten Kuningan

Dilakukan dengan melakukan *overlay* data hasil analisis alternatif lokasi Lahan KPI dengan kriteria tambahan yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan OPD Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda, DPUTR, Diskopdagperin, & DPMPTSP Kabupaten Kuningan ini, lokasi lahan KPI di Kabupaten Kuningan harus berada pada jangkauan pintu exit tol eksisting (Ciperna & Ciledug 1) yang

terletak di Kabupaten Cirebon dengan jarak maksimal 20km, serta harus terjangkau oleh jalan utama (arteri & kolektor) dengan jarak maksimal 1,5km. Hasil analisis ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan luasannya dimana lahan untuk KPI harus memiliki luas lahan minimal 5 Ha. Lahan dengan luas 5-50 Ha dapat dikembangkan untuk sektor industri kecil, menengah dan sentra IKM, sedangkan lahan dengan luas >50 Ha dapat dikembangkan untuk sektor industri besar dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri.

1.5 Tahapan/Proses

1.5.1 Persiapan

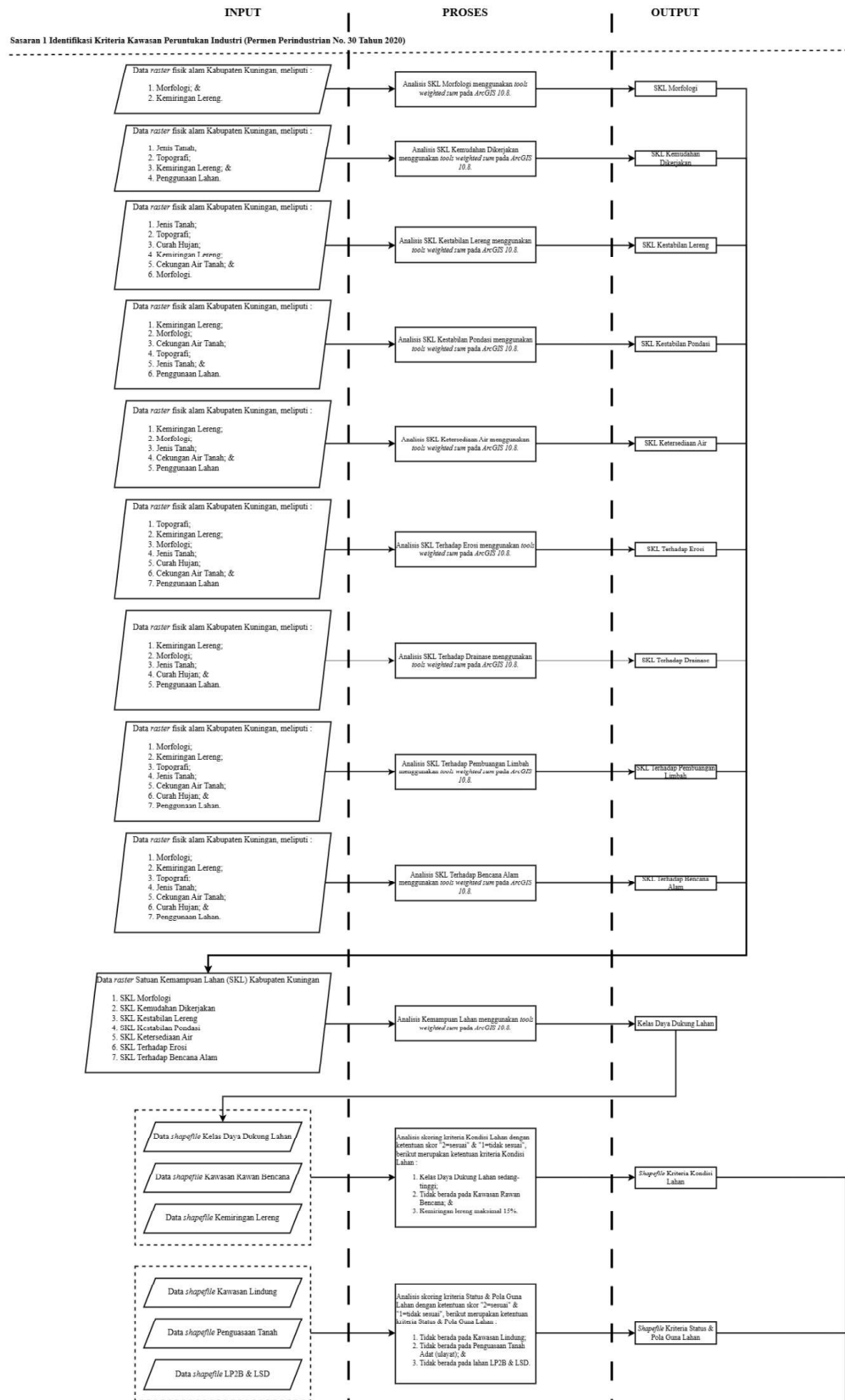
Tahap ini menjadi awal sekaligus dasar dari keseluruhan proses penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi, data, dan identifikasi kondisi wilayah studi untuk mendapatkan isu perencanaan di wilayah studi penelitian. Informasi dan data yang sudah didapatkan, kemudian dilakukan perumusan isu yang dikuatkan dengan studi literatur, penelitian terdahulu, telaah regulasi serta dokumen perencanaan dan kebijakan yang relevan dengan perencanaan lokasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kuningan.

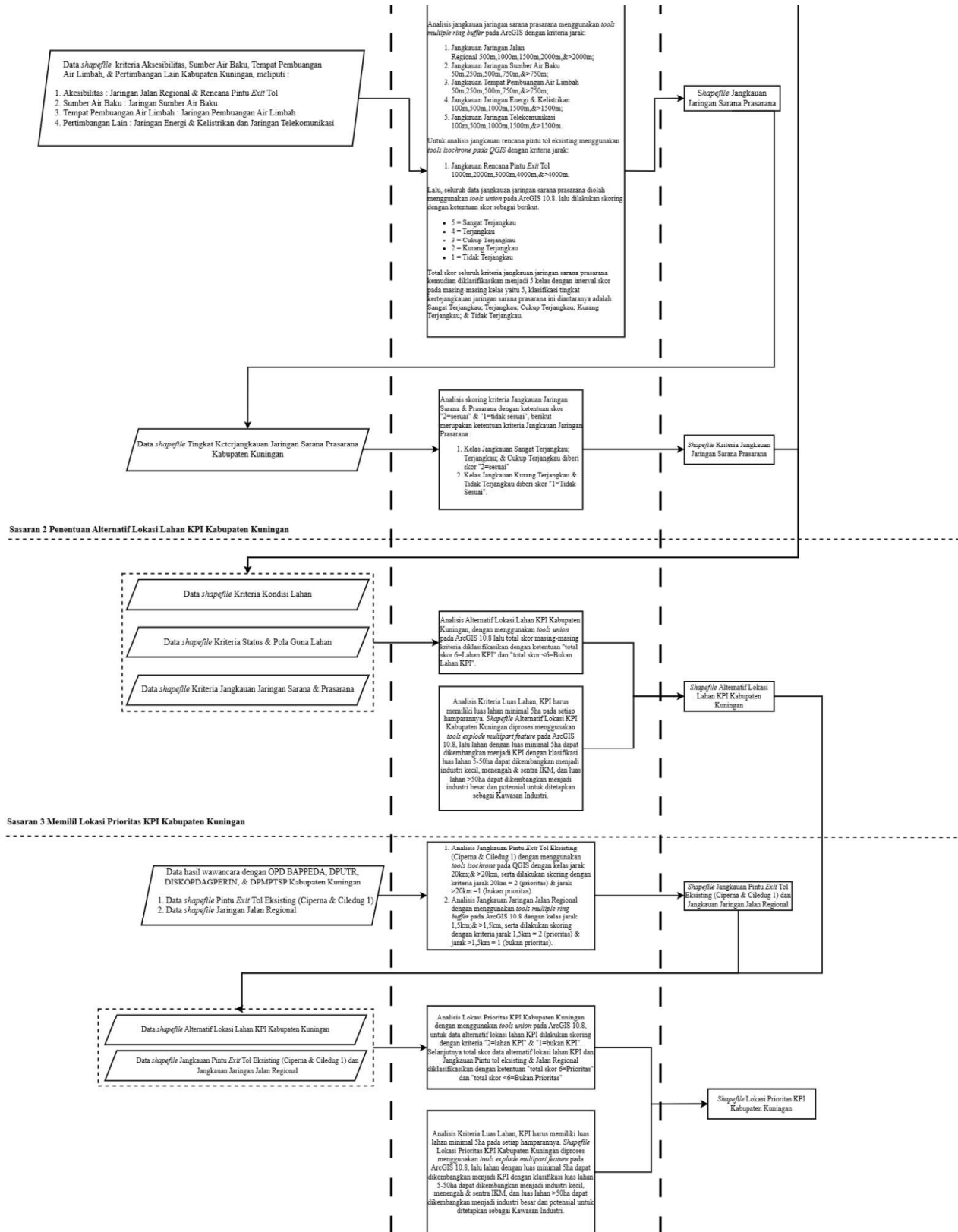
1.5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan metode survei primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui permohonan data serta wawancara kepada instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR), Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin), dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data sekunder didapatkan melalui telaah regulasi dan kebijakan seperti Perda Kab. Kuningan No. 26/2011 tentang RTRW Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031, Permen Perindustrian No. 30/2020 tentang Kriteria Teknis KPI, PermenPU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, serta berbagai studi literatur dari jurnal maupun penelitian terdahulu.

1.5.3 Pengolahan Data

Terdapat beberapa teknis analisis yang digunakan pada tahap pengolahan data penelitian tugas akhir ini untuk mendapatkan lokasi yang menjadi prioritas KPI di Kabupaten Kuningan. Pengolahan data pada penelitian ini digambarkan melalui diagram analisis berikut:





1.5.4 Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, hasil kesimpulan diambil berdasarkan pengolahan data serta kajian dari berbagai jurnal ataupun sumber kredibel lainnya, yang akan menghasilkan rekomendasi maupun saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

1.5.5 Luaran

Luaran dari hasil penelitian Tugas Akhir ini adalah peta rencana lahan KPI dan rencana lahan prioritas KPI di Kabupaten Kuningan.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Kebutuhan Data

Kebutuhan data meliputi berbagai daftar data yang diperlukan pada penelitian. Tabel kebutuhan data ini berfungsi untuk mengidentifikasi jenis data dan metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berikut tabel kebutuhan data dalam penelitian tugas akhir ini:

Tabel 1.1 Tabel Kebutuhan Data Penelitian

Sasaran	Nama Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Analisis	Sumber
Sasaran 1 Identifikasi kriteria lahan KPI	Morfologi	Primer	Shapefile	2024	Analisis Kemampuan Lahan	Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Topografi	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Kemiringan Lereng	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Jenis Tanah	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Curah Hujan	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Cekungan Air Tanah	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Penggunaan Lahan	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
Sasaran 2 Analisis alternatif lokasi lahan KPI	Kawasan Rawan Bencana	Primer	Shapefile	2024	Analisis Kriteria Kondisi Lahan	Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Kemiringan Lereng	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Kawasan Lindung	Primer	Shapefile	2024	Analisis Kriteria Status & Pola Guna Lahan	Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Lahan Sawah	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan

Sasaran	Nama Data	Jenis Data	Bentuk Data	Tahun	Analisis	Sumber
	Dilindungi (LSD)				Analisis Jangkauan Jaringan Sarana Prasarana	
	Penguasaan Tanah	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Rencana Jaringan Jalan	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Rencana Jaringan Air Baku	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Rencana Pembuangan Air Limbah	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Rencana Jaringan Energi dan Kelistrikan	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
	Rencana Jaringan Telekomunikasi	Primer	Shapefile	2024		Bappeda & DPUTR Kab. Kuningan
Sasaran 3 Analisis lokasi prioritas lahan KPI	Kriteria Pertimbangan Penentuan Lokasi KPI di Kabupaten Kuningan	Primer	Form Wawancara	2025	Analisis Lokasi Prioritas KPI Kabupaten Kuningan	Bappeda, DPUTR, Diskopdagperin, & DPMPTSP Kab. Kuningan

Sumber: Analisis Penulis, 2025

1.6.2 Instrumen Survei

Instrumen survei yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian Tugas Akhir ini diantaranya adalah:

1. Form Wawancara; dan
2. Surat Permohonan Data.

Form Wawancara merupakan salah satu bagian instrumen pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan analisis lokasi prioritas KPI, dimana diperlukan pendapat narasumber untuk menentukan lokasi prioritas KPI di Kabupaten Kuningan. Form Wawancara ini diisi oleh beberapa dinas terkait, diantaranya Bappeda, DPUTR, Diskopdagperin, dan DPMPTSP Kabupaten Kuningan, sedangkan surat permohonan data diperlukan dalam pengumpulan data-data yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan penelitian Tugas Akhir ini, seperti Bappeda, DPUTR, dan Diskopdagperin Kabupaten Kuningan.

1.6.3 Teknik Analisis

Pada penelitian tugas ini, dilakukan metode analisis spasial menggunakan aplikasi *ArcMap ArcGIS 10.8* dan aplikasi *QGIS 3.40.5*. Berikut merupakan penjabaran teknik analisis yang digunakan:

1. Analisis Daya Dukung Lahan

Salah satu kriteria teknis dalam penentuan lokasi Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Permen Perindustrian No. 30/2020 adalah Daya Dukung Lahan. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menghitung kemampuan lahan. Dimana berdasarkan PermenPU No. 20/PRT/M/2007 perhitungan kemampuan lahan dilakukan dengan melakukan perhitungan SKL. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat beberapa SKL yang harus dianalisis, diantaranya adalah:

Tabel 1.2 Input Data Analisis Satuan Kemampuan Lahan

SKL	Input
Morfologi	Data topografi, morfologi, & kemiringan lereng.
Kemudahan Dikerjakan	Data topografi, kemiringan lereng, jenis tanah & penggunaan lahan.
Kestabilan Lereng	Data topografi, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan. & cekungan air tanah (CAT).
Kestabilan Pondasi	Data kestabilan lereng, cekungan air tanah (CAT), jenis tanah, & penggunaan lahan.
Drainase	Data topografi, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, cekungan air tanah (CAT), & penggunaan lahan.
Ketersediaan Air	Data kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, cekungan air tanah (CAT), & penggunaan lahan.
Terhadap Erosi	Data kemiringan lereng, morfologi, curah hujan, jenis tanah, & penggunaan lahan.
Pembuangan Limbah	Data morfologi, kemiringan lereng, topografi, jenis tanah, cekungan air tanah (CAT), curah hujan, & penggunaan lahan.
Terhadap Bencana Alam	Morfologi, kemiringan lereng, topografi, jenis tanah, cekungan air tanah (CAT), curah hujan, & penggunaan lahan.

Sumber: PermenPU No.20/PRT/M, 2007

Setelah mendapatkan data SKL, selanjutnya seluruh data SKL tersebut dilakukan *overlay* menggunakan fitur *Intersect* serta dilakukan pembobotan, sehingga menghasilkan tingkat atau kelas pengembangan atau kemampuan lahan di Kabupaten Kuningan.

2. Analisis Kriteria Kondisi Lahan

Lahan untuk KPI harus memperhatikan kriteria kondisi lahan, diantaranya lahan KPI tidak boleh berada pada kawasan rawan bencana, memperhatikan daya dukung lahan, serta berada pada kemiringan lereng maksimal 15%. Analisis kriteria kondisi lahan dilakukan dengan melakukan *overlay* data kawasan rawan bencana, daya dukung lahan, serta kemiringan lereng. Hasil *overlay* kriteria kondisi lahan kemudian dilakukan skoring dengan kriteria nilai "2= sesuai dan nilai 1= tidak sesuai". Total nilai skor masing-masing kriteria

kondisi lahan kemudian dilakukan klasifikasi dengan ketentuan total nilai “6 = *Kondisi Lahan Sesuai*” dan nilai “<6 = *Kondisi Lahan Tidak Sesuai*”.

3. Analisis Kriteria Status & Pola Guna Lahan

Lahan untuk KPI juga harus memperhatikan kriteria status & pola guna lahan, dimana lahan tidak boleh berada pada lahan dengan status penguasaan tanah adat (ulayat), tidak berada pada kawasan lindung, dan tidak berada pada LP2B & LSD. Pada analisis kriteria status & pola guna lahan ini diproses dengan melakukan *overlay* data penguasaan tanah, kawasan lindung, LP2B dan LSD. Hasil *overlay* kriteria status & pola guna lahan kemudian dilakukan skoring dengan kriteria nilai “2 = *sesuai* dan nilai 1 = *tidak sesuai*”. Total nilai skor masing-masing kriteria status & pola guna lahan kemudian dilakukan klasifikasi dengan ketentuan total nilai “6 = *Status & Pola Guna Lahan Sesuai*” dan nilai “<6 = *Status & Pola Guna Lahan Tidak Sesuai*”.

4. Analisis Jangkauan Jaringan Prasarana

Analisis jangkauan jaringan prasarana dilakukan dengan menggunakan *tool multiple ring buffer* dan *isochrone*. *Tool multiple ring buffer* digunakan untuk menganalisis jangkauan jaringan prasarana jalan regional, jaringan sumber air baku, jaringan pembuangan air limbah, jaringan energi dan kelistrikan, serta jaringan telekomunikasi, sedangkan *tool isochrone* digunakan untuk menganalisis jangkauan layanan rencana pintu tol Cirebon Kuningan. *Shapefile* jangkauan masing-masing jaringan sarana prasarana kemudian diproses skoring dengan memberikan skor pada setiap kelas kriteria jangkauan jaringan prasarana dengan nilai 1-5. Kriteria skor yang digunakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3 Skoring Analisis Jangkauan Jaringan Prasarana

Nilai Skor	Keterangan
5	(S1) Sangat Sesuai
4	(S2) Sesuai
3	(S3) Cukup Sesuai
2	(N1) Kurang Sesuai
1	(N2) Tidak Sesuai

Sumber: Purwanto & Iswandi, 2019

Setelah dilakukan skoring pada setiap kriteria jangkauan jaringan prasarana, nilai skor tersebut dijumlahkan lalu diklasifikasikan dengan interval masing-masing kelas yang didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut.

$$I = \left(\frac{c - b}{k} \right)$$

Keterangan:

I = Rentang interval;

c = Skor total tertinggi;

b = Skor total terendah;

k = Jumlah kelas.

Sumber : (Salsabila & Santosa, 2024)

Berdasarkan hasil skoring didapatkan nilai skor total tertinggi yaitu 30 dan skor total terendah yaitu 6. Hasil skoring jangkauan jaringan prasarana ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, sehingga didapatkan interval pada masing masing kelas yaitu 5. Berikut merupakan klasifikasi jangkauan jaringan prasarana KPI.

Tabel 1.4 Klasifikasi Jangkauan Jaringan Prasarana

Tingkat Keterjangkauan	Total Skor
(S1) Sangat Terjangkau	25-30
(S2) Terjangkau	20-24
(S3) Cukup Terjangkau	16-20
(N1) Kurang Terjangkau	11-15
(N2) Tidak Terjangkau	6-10

Sumber: Nur dkk., 2024

5. Analisis Alternatif Lokasi Lahan KPI

Pada analisis ini seluruh aspek kriteria lahan KPI diproses dengan metode *overlay* serta dilakukan skoring dengan ketentuan nilai “2 = sesuai” dan nilai “1 = tidak sesuai”. Lalu, skor dari masing-masing kriteria tersebut dijumlahkan, dan dari perhitungan tersebut dilakukan klasifikasi dengan ketentuan nilai total “16 = Lahan KPI” dan nilai total “<16 = Bukan Lahan KPI”. Alternatif lokasi lahan KPI hasil analisis selanjutnya dapat di klasifikasikan berdasarkan luas lahan per hamparannya dengan ketentuan luas lahan minimal 5 Ha, dimana lahan dengan luas 5-50 Ha dapat dikembangkan dengan sektor industri kecil, menengah dan sentra IKM. Sedangkan KPI dengan luas lahan >50 Ha dapat dikembangkan dengan sektor industri besar dan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan industri.

6. Analisis Lahan Prioritas KPI

Analisis ini menggunakan metode *overlay* lokasi potensial KPI dengan kriteria tambahan, dimana kriteria ini didapatkan dari hasil wawancara OPD serta kajian literatur dan regulasi yang sesuai untuk menentukan lokasi prioritas KPI di Kabupaten Kuningan, analisis ini bertujuan untuk mempersempit pilihan lokasi hasil analisis alternatif lokasi KPI yang sudah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda, DPUTR, Diskopdagperin, & DPMPTSP Kabupaten Kuningan terdapat 2 kriteria tambahan untuk memiliki lokasi prioritas untuk pembangunan KPI di Kabupaten Kuningan. Kriteria tersebut diantaranya, lokasi lahan KPI harus terjangkau oleh pintu exit tol eksisting (Ciperna &

Ciledug 1) yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan jarak maksimal 20km, serta lokasi lahan KPI harus terjangkau oleh jalan utama (arteri & kolektor) dengan jarak maksimal 1,5km. Lokasi lahan KPI hasil analisis selanjutnya dapat di klasifikasikan berdasarkan luas lahan per hamparannya dengan ketentuan luas lahan minimal 5 Ha, dimana lahan dengan luas 5-50 Ha dapat dikembangkan dengan sektor industri kecil, menengah dan sentra IKM. Sedangkan KPI dengan luas lahan >50 Ha dapat dikembangkan dengan sektor industri besar dan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan industri.

1.6.4 Hasil Akhir

Hasil akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah peta lokasi prioritas untuk dikembangkan menjadi KPI Kabupaten Kuningan sesuai dengan Permen Perindustrian No. 30/2020 tentang Kriteria Teknis KPI dan kriteria tambahan sesuai dengan hasil wawancara instansi daerah Kabupaten Kuningan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Susunan laporan tugas akhir ini terbagi atas 5 (lima) struktur pembahasan. Struktur pembahasan ini digunakan untuk menjelaskan isi dari setiap bagian, diantaranya yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan materi, tahapan/proses penelitian, serta metode dan hasil akhir penelitian ini.

BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Bagian ini menjabarkan terkait keseluruhan konsep perencanaan dalam bentuk kerangka pikir dan teori yang relevan dengan tema dan poin-poin yang dibahas pada penelitian.

BAB 3 GAMBARAN AREA PERENCANAAN

Bagian ini menjabarkan gambaran kondisi wilayah Kabupaten Kuningan dari aspek fisik serta non fisik yang dapat menjadi input dalam penelitian ini.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil analisis penentuan lokasi KPI di Kabupaten Kuningan sesuai dengan Permen Perindustrian No. 30/2020, serta terdapat hasil analisis penentuan lokasi prioritas KPI di Kabupaten Kuningan.

BAB 5 PENUTUP

Bagian ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta terdapat rekomendasi yang dapat digunakan baik untuk peneliti maupun pihak-pihak yang membutuhkan.